

Universalisme Islam Dan Kontribusinya Dalam Konstruksi Indonesia Baru

Umi Sumbulah

I

Indonesia baru, hingga detik inipun masih menjadi bahan perbincangan yang cukup menarik. Berbagai forum seminar dan dialog diselenggarakan dalam rangka mencari makna dan format ke depan sosok Indonesia baru tersebut. Berbagai tanggapan muncul dan berkembang, baik yang bernada optimistis bahwa Indonesia Baru akan benar-benar terciptakan, dan adapula yang bernada optimistis bahwa Indonesia Baru yang dicitakan banyak orang itu adalah angan-angan kosong dan impian belaka.

Kedua kelompok tanggapan di atas -optimistis dan pesimistis- agaknya memiliki berbagai argumen pendukung. Kelompok pertama, menyatakan bahwa Indonesia baru akan benar-benar tercipta, dengan alasan : *pertama*, secara sosiologis, bangsa Indonesia memiliki potensi, yakni kemajemukan (pluralisme) tidak hanya pada teologi, tetapi juga institusi, organisasi, dan budaya. Disadari bahwa kemajemukan memang memiliki dua sisi, sisi konstruktif dan sisi destruktif. Sisi konstruktif itulah yang harus dikembangkan oleh bangsa tercinta ini. *Kedua*, kultur mondial yang tidak lagi terbatas oleh geografi (trans-geografis) memberikan pengaruh yang sangat besar bagi berhembusnya demokratisasi. Karenanya, semua individu bangsa dapat "unjuk gigi" menampilkan wajah demokratis, tentunya juga didukung dengan *political will* dari elite penguasa. *Ketiga*, meningkatnya kesadaran beragama. Hal ini, di antaranya dapat dilihat pada beberapa kaum agamawan yang tidak hanya memperhatikan aspek kesalehan ritual (statistikal-nominal) tetapi juga aspek kesalehan aktual/sosial. Fenomena ini akan menjadi potensi konstruktif bagi penciptaan konstruksi Indonesia baru.

Sementara kelompok yang bernada pesimistis dengan terciptanya Indonesia yang benar-benar baru, agaknya mendasarkan argumentasinya pada beberapa alasan *pertama*, trauma sejarah terporak-porandanya persatuan dan kesatuan bangsa oleh berbagai

kepentingan; *kedua*, multi-krisis yang dialami Indonesia membuat bangsa ini sulit untuk membangun dan mengembalikan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga Indonesia Baru juga kemungkinan besar sulit terciptakan.

Dalam kaitannya dengan konsep universalisme Islam dan kontribusinya dalam konstruksi Indonesia Baru, dapat berangkat dari pemikiran tentang konsep *al-dharuriyat al-khamsah*, yang tentu saja pemanahannya mencakup seluruh manusia dan perjalanan sejarah kemanusiaan Indonesia, yang dalam banyak hal bersifat *diversity*, sesuai dengan konsep *rahmatan li al-'alamin*.

II

Diskursus di seputar universalisme Islam, tidak terlepas dari konsep *maqashid al-syari'ah*, yang familiar dengan sebutan *dharuriyat al-khamsah*, yakni : 1) hak untuk hidup (*hifdz al-hayat*), 2) hak untuk mempertahankan keyakinan beragama (*hifdz al-din*), 3) hak untuk berfikir dan berpendapat (*hifdz al-aql*), 4) hak berketurunan (*hifdz al-nasl*).

Dalam kaitannya dengan *dharuriyat al-khamsah* di atas, Islam sangat memberikan perhatian yang besar terhadap aktualisasinya. Karenanya, Islam juga memberikan sekian aturan dan rambu-rambu serta petunjuk operasionalnya, kendati masih bersifat sangat umum. Justru dalam keumumannya inilah Islam menemukan elan vitalnya. Karena ia akan selalu dapat responsif dan dialogis terhadap perkembangan zaman. Di sinilah Islam dikenal sebagai agama yang memiliki keluasan dan keluwesan.

Upaya penegakan dan penjagaan kelima hak dasar di atas, perlu dilakukan diantaranya dengan jalan secara terus menerus menyupayakan demokratisasi. Karena demokratisasilah jalan paling efektif terlaksananya dan terlindunginya hak-hak dasar di atas (HAM).

Terdapat tiga elemen penting dalam perwujudan demokratisasi ini, yakni *justice, equality dan freedom*

(Khofifah, 1999). Justice (keadilan) harus dapat dinikmati dan dirasakan setiap manusia dari kalangan manapun, tidak seperti dalam praktik selama ini bahwa keadilan hanya milik kaum borjuis dan tidak berpihak pada kaum ploreter. Hal ini, sebenarnya sudah diprediksikan oleh Rasulullah dalam salah satu teks hadisnya yang intinya bahwa "kehancuran generasi sebelum kita adalah karena mereka tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan, yakni ketika pencurian (kedzaliman) dilakukan oleh kalangan bangsawan maka tidak ditegakkan hukum kepadanya sementara jika yang melakukan pencurian (kedzaliman) itu adalah kalangan kaum dhu'afa' maka ditegakkan hukum padanya". Karenanya, jika bangsa Indonesia ingin bisa survive, maka juga harus menjunjung tinggi nilai keadilan (*justice*) dan persamaan (*equality*) ini, yang meliputi ekonomi (properti dan kesempatan kerja) serta keadilan dalam perlakuan dan perlindungan hukum.

Islam dengan prinsip universalismenya, sangat memperhatikan keadilan dalam berbagai bidang tersebut di atas. Karenanya, tegaknya keadilan merupakan cita-cita yang harus direalisasikan dalam setiap kesempatan. Sinyalemen al-Qur'an tentang terma-terma keadilan yang dicerminkan dalam beberapa ayatnya, memberikan pemahaman bahwa pesan moral ini harus selalu ditegakkan. Ini bisa dilihat misalnya dalam QS

Menegakkan keadilan dalam bidang apapun, merupakan segmentasi dari hakikat dasar kemanusiaan. Ia juga merupakan sunnatullah, yang inheren dengan eksistensi kelahiran manusia di dunia fana ini. Untuk itu, keharusan menegakkan keadilan merupakan keharusan zaman yang bernilai hukum yang obyektif (Nurcholis, 1995: 184). Al-Qur'an bahkan menyatakan bahwa keadilan merupakan bagian dari hukum kosmis yang harus dijaga keseimbangannya secara mutlak. Karena jika tidak, akan menimbulkan kekacauan. Penegakan keadilan akan menciptakan kebaikan, terlepas dari siapapun yang melaksanakannya. Sebaliknya ketiadaan upaya penegakan keadilan akan menga-

kitabkan malapetaka, tanpa memandang siapapun yang melakukannya.

Agaknya, pesan moral penegakan keadilan ini memang mendapatkan prioritas. Ini bisa terlihat dari penghargaan Tuhan terhadap keadilan karena ia dianggap sebagai karya positif yang paling dekat dengan ketakwaan -satu standard penghargaan tertinggi yang dapat membedakan kedudukan masing-masing individu di hadapan kebesaran Tuhan.

Pesan Tuhan tentang penegakan keadilan ini, juga menjadi perhatian khusus nabi, ketika menjelang kewafatan beliau, dengan teks sebagai berikut :

"Wahai sekalian manusia ! Ingatlah Allah ! Ingatlah

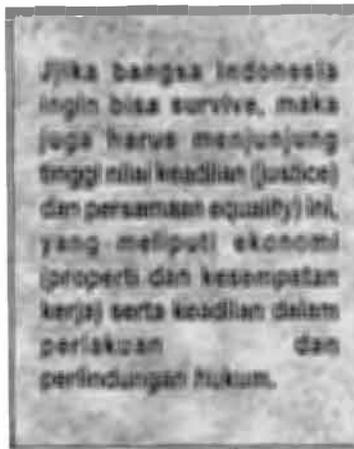
Allah, dalam agamamu dan sekalian: Ingatlah Allah ! Allah, berkenaan dengan yang kamu kuasai dengan tangan nanmu! Berilah mereka makan yang kamu makan, dan mereka pakaian seperti yang kenakan ! Dan janganlah kamu bani mereka dengan beban mereka tidak sanggup menanggungnya. Sebab sesungguhnya mereka adalah daging, darah dan makhluk seperti halnya kamu sekalian sendiri. Awas, barangsiapa bertindak dzalim kepada

mereka, maka akulah musuhnya di Hari Kiamat, dan Allah adalah hakimnya.....". (Nurcholis Madjid, 1995 : 185)

Dari pidato Rasulullah di atas, dapat dipahami betapa tingginya tingkat kemendesakan nilai keadilan harus diaktualisasikan dalam kehidupan ini. Bahkan saking tingginya nilai keadilan ini, Rasulullah mengancam orang yang tidak mau menegakkannya (dzalim) dengan ancaman bahwa orang tersebut akan menjadi musuh Rasulullah dan akan dihakimi sendiri oleh Tuhan.

Berangkat dari sinyalemen teologis dan realitas historis di atas, maka sudah menjadi keharusan setiap manusia untuk menegakkan keadilan, di antaranya dengan memiliki sikap keberpihakan pada kaum *dhu'afa'* dan *mustadb'afin*, baik dalam distribusi ekonomi, pendidikan, hukum, politik dan semua hak dasar kemanusiaan.

Kembali kepada masalah universalisme Islam, di



samping terlihat dalam konsep *al-sharuriyat al-khamsah*, juga terlihat dalam aspek kesejarahan maupun substansi Islam itu sendiri.

Secara kesejarahan, Islam khusus (institusi formal) yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad merupakan kelanjutan dan konsistensi serta keterpautan historis dengan ajaran keagamaan yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, di mana inti pesan-pesan keagamaan dimaksud adalah tawhid. Keterpautan historis antara Islam yang dibawa Muhammad dengan Islam yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu adalah : *pertama*, adanya kesamaan geografis, yakni hampir seluruh nabi diutus di kawasan jazirah arab. Ini menandakan bahwa bangsa Arab merupakan representasi dekadensi moral norma kehidupan dunia dalam setiap kurun diutusnya para nabi. *Kedua*, masih banyaknya syariat nabi-nabi terdahulu yang tidak diabrogasi dengan kehadiran Islam yang dibawa Muhammad Saw. dan bahkan tetap dilaksanakan hingga sekarang.

Keterpautan sejarah antara nabi itu menunjukkan bahwa sebenarnya inti dari misi profetik para utusan Tuhan itu adalah Islam, yakni sikap kepasrahan dan ketundukan total hamba kepada Tuhannya. Karena itu pulalah, agaknya al-Qur'an menyitir bahwa : "Bukankah Ibrahim itu seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang muslim yang *hanif*" (QS. 3:67).

Ayat di atas memperkuat tesis bahwa yang dibawa oleh semua nabi itu tidak tereduksi dengan nama primordialisme yang mengacu kepada institusi formal semisal Islam, Nasrani, Yahudi dan lain-lain, tetapi lebih kepada aktualisasi nilai profetik dalam bentuk kepatuhan dan ketundukan makhluk terhadap sang Khalik, kendati betapa ada perbedaan dalam dataran eksotis masing-masing.

Penyebutan al-Qur'an bahwa Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan juga bukan seorang Nasrani, didasarkan pada alasan : *pertama*, karena secara historis kemunculan dan kepengutusan Ibrahim adalah jauh sebelum munculnya ajaran nabi Musa —yang kemudian diidentifikasi sebagai agama etnis Yahudi— dan ajaran Isa —yang pada tahap berikutnya dinisbatkan kepada suatu tempat diutusnya nabi Isa yakni di Nazareth, sehingga kemudian pesan keagamaan yang

dibawanya dinamakan Nasrani. *Kedua*, karena Ibrahim hanya mengikuti kebenaran primordial —perennial yang inheren dengan eksistensi manusia di dunia ini (fitrah). Pesan ajaran Ibrahim ini, pada tahap berikutnya diikuti oleh Musa, Isa dan Muhammad sendiri. Karenanya, agama (institusional-formal) yang disandarkan kepada ketiga nabiyullah ini disebut sebagai *the Abrahamic Religions* (agama satu rumpun dari kakek Ibrahim). Karena satu rumpun, sebagai konsekuensinya tidak mungkin substansi ketiganya berbeda.

Berpijak pada statemen di atas, dapat dipahami bahwa misi profetik pembawa agama Ibrahim adalah satu, yakni tawhid, yang diimplementasikan pada bentuk kepatuhan dan ketundukan kepada Tuhan. Karenanya, *truth claim*, superioritas inferioritas satu atas yang lain tidak layak dimunculkan. Hal ini penting dilakukan dalam menjaga hak keagamaan (*hifz al-din*) setiap individu dalam rangka terciptanya tatanan Indonesia Baru yang diimpikan semua komponen bangsa, sehingga terhindar dari segala macam clash dan konflik serta kemungkinan penciptaan zona yang dapat "diobok-obok" oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

Dalam doktrin religi, independensi terlihat pada konsep tawhid, yakni pembebasan diri dari segala bentuk ketergantungan dan penghambaan diri kepada selain Tuhan (QS. 16:36). Tuntutan bersikap demikian tercemrin dalam ikrar *syahadat* yang menuntut ketiadaan sekutu atau penyetaraan terhadap Allah. Terma *lailaha...* (tiada Tuhan) mengandung arti semua sistem kepercayaan palsu yang akan menetralkan rohani dari pemujaan yang keliru. Baru kemudian diikuti statemen afirmatif berupa pengakuan akan eksistensi Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan terma *illa Allah* (kecuali Allah).

Pembebasan diri dari segala bentuk ketergantungan dan penghambaan terhadap selain Tuhan inilah sebenarnya intisari risalah semua kenabian yang diutus Tuhan untuk semua bangsa di muka bumi ini.

Pendapat beberapa sinyalemen al-Qur'an tentang kecenderungan manusia untuk berlaku tiran, yakni ketika seseorang merasa bahwa dirinya berkecukupan (*istaghna*) (QS. 20:24). Sikap seperti ini pada tahap berikutnya akan menghilangkan dan menumpulkan kepekaan dan komitmen sosial seseorang. Selanjutnya juga berimplikasi pada pengikisan hak-hak dasar

kemanusiaan, satu sikap yang sangat bertentangan dengan prasyarat penciptaan Indonesia baru yang ideal. Ini karena bersikap kurang membutuhkan orang lain, berarti meremehkan mereka dan menganggap dirinya superior, satu sikap pemaksaan pengakuan orang lain terhadap dirinya. Hal ini juga bertentangan dengan konsep tawhid yang dalam cakupan lebih luas dapat menumbuhkan komitmen sosial yang membawa kepada pembebasan manusia dari segala bentuk ketergantungan (*non-independence*) dan penghambaan terhadap selain Tuhan.

Lebih jauh, kepasrahan total terhadap Tuhan ini akan memacu semangat dan aktivitas positif bagi manusia. Hal ini pernah ditunjukkan kepada dunia oleh masyarakat di awal-awal Islam, dengan keyakinan dan kepercayaan penuh mereka membebaskan diri dari "cengkeraman" kekuatan bangsa-bangsa sekitarnya. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, umat Islam disambut kedatangannya sebagai "pembebas" dari berbagai negara yang dijajah oleh rezim Romawi, Byzantium yakni Irak, disusul Mesopotamia dan Mesir. Karena ini pula, maka ideologi ekspansi Islam dikenal dengan sebutan ideologi pembebasan (*fitubat*) (Harun Nasution, 1995). Karena kedatangan Islam semata-mata ingin membebaskan suatu negara dari ketergantungan dan penghambaan kepada negara penjajah. Di sinilah agaknya letak konsistensi ketauhidan dalam Islam.

Berkaitan dengan independensi yang merupakan elemen penting bagi perwujudan demokratisasi, memiliki implikasi pemikiran bahwa setiap individu harus memiliki independensi. Ini terkait erat dengan pandangan setiap insan Indonesia terhadap diri, keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Kepedulian terhadap diri, masyarakat dan bangsanya ini, jauh-jauh ketika di awal-awal Islam datang telah disinyalir oleh Rasulullah dalam sebuah teks hadisnya : "Sebaik-baik individu adalah yang dapat mengkontribusikan nilai-nilai kepositifan kepada sesa-

manya" (HR. al-Bukhari).

Teks hadis di atas, memiliki kandungan makna yang sangat luas. Keluasan dimaksud terdapat dalam dua hal : *pertama*, seseorang dapat memberikan dampak positif pada sesamanya jika ia sendiri memiliki (sejumlah) kepositifan; *kedua*, terma "memberikan kepositifan kepada sesama" memiliki cakupan makna yang luas, yakni bisa berarti keluarga, masyarakat dan bangsanya. Karenanya, seseorang yang mendapat predikat insan terbaik, adalah insan / setiap individu yang memiliki kepedulian terhadap diri, keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dengan mengamati perilaku manusia dalam mengikuti perintah dan menjauhi larangan Tuhan akan memberikan pengertian bahwa manusia itu adalah makhluk budaya. Karena dibentuk dan berkembang menjadi seorang yang berkepribadian terjadi dalam kebudayaan masyarakat. Di masyarakat nilai-nilai etis manusia adalah menjadi dasar dan ukurannya yang merupakan sumber orientasi norma-norma masyarakat.

Kepedulian terhadap diri sendiri ditandai dengan adanya pemahaman seseorang akan potensi diri, bakat, kelebihan dan kekurangannya. Di sinilah setiap individu dituntut untuk mengoptimalkan potensi dan menggali kelebihan serta menutupi kekurangan dirinya. Jika setiap individu memiliki kepedulian akan dirinya maka dia akan memiliki kepedulian terhadap sesamanya.

Kepedulian terhadap keluarga, dipahami sebagai kepedulian terhadap segala hal yang menimpa, menjadi beban dan tanggung jawab keluarganya. Ini diisyaratkan pula oleh QS. 66:6. Kepedulian jenis ini membawa konsekuensi logis pada keharusan bagi orang tua untuk memberikan pendidikan dan bimbingan yang terbaik kepada anggota keluarganya (dalam hal ini anak-anaknya/pihak-pihak yang menjadi tanggungannya).

Kepedulian terhadap masyarakat dipahami bahwa untuk menciptakan keharmonisan hidup, setiap individu harus menyadari hak dan kewajibannya, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial sekaligus. Karena itu segala hal yang berkaitan dengan orang lain terutama masalah yang menyangkut orang banyak, setiap individu harus mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*). Sehingga ia satu dengan yang lain benar-benar merasa bersaudara (QS. 49:10).

Kepedulian terhadap bangsa membawa implikasi

pemikiran bahwa setiap individu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala hal yang dialami bangsanya, maju dan mundurnya bangsa dan lain-lain. Karenanya, logis kalau kemudian para pemikir dan pembela nasionalisme, sampai-sampai mengkaitkan antara kepedulian terhadap bangsa ini sebagai bagian dari elemen penyempurna tingkat keimanan seseorang (*hubb al-waithan min al-iman*).

Kepedulian terhadap keempat unsur di atas, dituntut dalam upaya menata Indonesia Baru. Ini karena Indonesia baru mengharuskan keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen bangsa, sesuai dengan posisi dan proporsinya. Di sinilah agaknya letak independensi (kemandirian) itu diarahkan.

Universalisme Islam, di samping terlihat pada adanya independensi dan demokratisasi, juga dapat disimak pada ajaran-ajarannya yang memiliki kepedulian terhadap unsur-unsur utama kemanusiaan, yang diimbangi oleh kearifan yang muncul dari watak peradaban Islam itu sendiri yang terbuka, adaptif dan akomodatif (Abdurrahman Wahid, 1995:545).

Dalam spektrum yang lebih luas, kemandirian (independensi) harus dapat dimiliki oleh negara kendati dalam kultur global. Artinya, bahwa di era keterbukaan di segala lini kehidupan ini, setiap bangsa dituntut untuk mampu mandiri dengan tujuan agar tidak terlindas dan tidak pula terbawa arus kemodernan, tetapi dapat beradaptasi di dalamnya dengan tidak kehilangan jati dirinya sebagai sebuah bangsa, yang memiliki ciri khas keadaban tersendiri.

Permasalahannya adalah, di mana Islam dapat membuktikan universalitasnya terutama di era Indonesia baru yang dicitakan seluruh komponen masyarakat Indonesia? pertanyaan tersebut tidak mudah ditemukan jawaban dan solusinya. Mengapa, karena di samping pemahaman umat Islam sendiri terhadap Islam belum sepenuhnya berkeadilan dan memperhatikan komponen di luar komunitas muslim, juga karena belum adanya pemahaman yang komprehensif dan integratif terhadap Islam itu sendiri.

Kontribusi Islam dalam menciptakan konstruk Indonesia Baru juga harus dipahami seberapa jauh potensi yang telah diisyaratkan Islam itu ditangkap maknanya, sehingga bisa diaktualisasikan seiring dengan

proses Indonesia Baru itu sendiri tercipta.

III

Indonesia Baru merupakan satu cita ideal yang memiliki kemungkinan besar tercipta. Ini karena bangsa Indonesia memiliki potensi untuk mewujudkannya. Secara sosiologis, keragaman yang dimiliki bangsa tercinta ini dapat menjadi potensi konstruktif bagi penciptaan cita ideal dimaksud. Cita rasa agamis, juga merupakan potensi lain yang bisa dikembangkan, karena nilai-nilai keagamaan universal dapat mewarnai segala aspek kehidupan bangsa ini, baik menyangkut kehidupan sosial, budaya, hukum, politik maupun lainnya.

Universalisme Islam, dengan konsep *al-dharuriyat al-khamsab-nya*, merupakan penopang bagi tegaknya hak asasi manusia (HAM), yang terderivasi pada lima hak dasar kemanusiaan, yang meliputi hak hidup (*hifz al-bayat*), hak kepemilikan atas harta/properti (*hifz al-mal*), hak mempertahankan keyakinan agama (*hifz al-din*), hak untuk berfikir dan berpendapat (*hifz al-'aql*) dan hak berketurunan (*hifz al-nasl*).

Dalam rangka menjamin terpeliharanya kelima hak dasar di atas, setiap komponen bangsa diharuskan memiliki prasyarat berupa independensi dan demokratisasi yang meliputi *freedom, justice dan equality*. Prasyarat dimaksud, menuntut implementasi tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga *good will and political will* dari elite penguasa. Semoga, teraktualisasikannya nilai-nilai universalisme Islam dalam rangka menuju Indonesia Baru bukan hanya kamufase akademik belaka.

Daftar Pustaka

1. Abdurrahman Wahid, Universalisme Islam, dalam Buddy Munawar-Wahman (Editor), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* Paramadina, Jakarta, 1995
2. Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Mizan, Bandung, 1998.
3. Harun Nasution, *Kuliah Sejarah Peradaban Islam*, PPS IAIN "Imam Bonjol" Padang 1995.
4. Khofifah Indar Parawansa, *Perbincangan di Seputar Indonesia Baru*, Radio Kalimaya Baskara, September 1999
5. Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, Paramadina, Jakarta, 1995
6. George B. Grose dan Benjamin J. Hubbard (Ed.), *Tiga Agama Satu Tuhan : Sebuah Dialog*, Mizan, Bandung, 1998.